



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2025

**Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Provinsi
Kalimantan
Timur**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efisien dan efektif, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Selain itu, sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Samarinda, 25 Februari 2026

Kepala Dinas,



H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680805 199402 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tata Pemerintah pada Perangkat Daerah yang baik merupakan refleksi dari Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Sebagaimana halnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Jika diproyeksikan target untuk sasaran 4 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim tercapai sesuai target, maka perhitungan rata-rata capaian kinerja untuk Sasaran 4 adalah sebagai berikut:

- Proyeksi Capaian Indikator: 100% (asumsi realisasi sama dengan target).
- Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4: 96,44%

Angka ini memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap efektivitas tata kelola birokrasi di lingkungan Diskominfo Prov. Kaltim untuk periode tahun 2025, namun angka pastinya masih menunggu hasil evaluasi resmi dari Inspektorat.

Dan untuk Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran adalah 108,74%. Angka 108,74% tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Rincian capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE (Tujuan)	Persen	35	76	217
2	Persentase PD yang masuk kategori informatif (Sasaran 1)	Persen	25	18,75	75
3	persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Sasaran 1)	Persen	60	100	166,67
4	Tingkat maturitas dan keamanan informasi (Sasaran 2)	Level	3	3	100
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (Sasaran 3)	Persen	85	100	117,65
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim (Sasaran 4)	Nilai	75	75	100
7	Survei Kepuasan Masyarakat (Sasaran 4)	Nilai	88	81,73	92,88

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	20
1.3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	21
1.4. Sarana dan Prasarana Kerja	22
BAB II Perencanaan Kinerja	26
2.1. Perencanaan Strategis	26
2.2. Indikator Kinerja Utama	31
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
BAB III Akuntabilitas Kinerja	36
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2024	36
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	38
3.3. Analisis Capaian Kinerja	40
3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2025	93
BAB IV Penutup	101
4.1. Kesimpulan	101
4.2. Saran	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja.....	iii
Tabel 2. Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2025.....	19
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.....	22
Tabel 4. Perencanaan Strategis.....	28
Tabel 5. Program Prioritas Dan Kegiatan Pendukungnya.....	29
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026.....	32
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.....	34
Tabel 8. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.....	35
Tabel 9. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	35
Tabel 10. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024.....	36
Tabel 11. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	37
Tabel 12. Predikat Indeks SPBE.....	38
Tabel 13. Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	39
Tabel 14. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025	41
Tabel 15. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	41
Tabel 16. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target RPD/RENSTRA	42
Tabel 17. Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional	42
Tabel 18. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	43
Tabel 19. Capaian Sasaran Strategis 1 (Satu).....	44

Tabel 20 Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	45
Tabel 21. Realisasi Sasaran 1 (Satu) tahun 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024-2026.....	45
Tabel 22. Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 1 (satu).....	49
Tabel 23. Program/Kegiatan yang penunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja Sasaran 1 (Satu).....	50
Tabel 24. Penyelenggaraan internet desa	60
Tabel 25. Fasilitas akses internet Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	61
Tabel 26. Capaian Sasaran Strategis 2 (Dua)	67
Tabel 27. Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024.....	68
Tabel 28. Realisasi Sasaran 2 (Dua) tahun 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024-2026.....	69
Tabel 29. Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 2 (Dua)	70
Tabel 30. Program/Kegiatan yang penunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja Sasaran 2 (Dua)	72
Tabel 31. Capaian Sasaran Strategis 3 (Tiga)	76
Tabel 32. Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	76
Tabel 33. Realisasi Sasaran 2 (Dua) tahun 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024-2026.....	77
Tabel 34. Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 3 (Tiga).....	78
Tabel 35. Program/Kegiatan yang penunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja Sasaran 3 (Tiga)	79
Tabel 36. Capaian Sasaran Strategis 4 (empat)	81
Tabel 37. Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024.....	82

Tabel 38. Realisasi Sasaran 4 (empat) tahun 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024-2026	83
Tabel 39. Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4 (empat)	83
Tabel 40. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja Sasaran 4 (empat)	85
Tabel 41. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	93
Tabel 42. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	94
Tabel 45. Perbandingan Realisasi Anggaran	95
Tabel 46. Realisasi anggaran sasaran 4 (empat) Renstra 2024-2026	96
Tabel 47. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	19
Gambar 2 : Tampilan web aplikasi SIMAIN.....	59
Gambar 3 : Tampilan <i>super app</i> (Sakti Gemas).....	63
Gambar 4 : Tampilan Senada.....	64
Gambar 5 : Tampilan Website PPID Prov Kaltim.....	65
Gambar 6 : Tampilan Website SIDA Kaltim	66
Gambar 7. Penilaian Indeks KAMI versi 5.0 dan IKAS+ secara luring.....	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Penyelenggaraan internet Desa60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan bidang Komunikasi dan Informatika serumpun dengan urusan Persandian dan Statistik, dan dijelaskan pula dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan ini menimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kominfo Prov. Kaltim) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan pemerintahan Bidang Statistik. Dukungan Teknologi Informasi Komunikasi bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.

1.1.1. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

1.1.1.1. Tugas Pokok Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.1.1.2. Fungsi Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur

Fungsi Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- b) Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- d) Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang informasi komunikasi public dan kehumasan;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang teknologi informasi komunikasi dan persandian;

- g) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang aplikasi informatika;
- h) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang statistik;
- i) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada dengan Susunan Organisasi sebagai berikut;

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Umum; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Bidang Aplikasi Informatika membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Bidang Statistik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kepala Dinas

Berdasarkan pada pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Kaltim Nomor 43 Tahun 2023, **Kepala Dinas** mempunyai tugas yakni :

- a) merumuskan program kerja berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c) membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yg diharapkan;
- d) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) mengendalikan urusan persuratan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) mengendalikan urusan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional;
- g) mengendalikan sarana dan prasarana kantor yang meliputi pengadaan dan pengelolaan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit-unit di lingkungan dinas;
- h) merumuskan, merencanakan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis informasi komunikasi publik dan kehumasan, teknologi informasi komunikasi dan persandian;
- i) merumuskan, merencanakan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis aplikasi informatika dan statistik;
- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- k) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretariat

Berdasarkan pada pasal 488 Pergub Kaltim Nomor 43 Tahun 2023, Sekretariat dipimpin oleh **Sekretaris** yang mempunyai tugas yakni:

- a) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 ayat (2), **Sekretaris** menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b) penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c) penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- d) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- e) pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, **Sekretaris** mempunyai uraian tugas:

- a) menghimpun perencanaan program kegiatan dinas dan menyusun perencanaan program sekretariat sesuai petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) merumuskan rancangan kegiatan sekretariat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi;
- f) menyelenggarakan fasilitasi kepegawaian terhadap pegawai berdasarkan permasalahan yang dialami untuk mendapatkan penyelesaian;
- g) mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi Sekretariat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi Sekretariat di lingkungan Pemerintah;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

C. Subbagian

Berdasarkan pada pasal 491 Pergub Kaltim Nomor 43 Tahun 2023, **Subbagian Perencanaan Program** mempunyai tugas yakni:

- a) Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b) Subbagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 ayat (2), **Subbagian Perencanaan Program** mempunyai uraian tugas:

- a) menghimpun perencanaan program kegiatan dinas dan menyusun perencanaan program pada Subbagian Perencanaan program sesuai petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) menyelenggarakan pengelolaan/kegiatan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- f) melaksanakan pengelolaan/kegiatan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;

- g) melakukan koordinasi dan penyusunan kegiatan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan dinas;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan pada pasal 493 Pergub Kaltim Nomor 43 Tahun 2023, **Subbagian Umum** mempunyai tugas yakni:

- a) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 ayat (2), **Subbagian Umum** mempunyai uraian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Subbagian umum berdasarkan rencana operasional/program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) menyelenggarakan pengelolaan/kegiatan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- f) melaksanakan pengelolaan/kegiatan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- g) melakukan koordinasi dan penyusunan kegiatan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan dinas;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

D. Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan

Berdasarkan pada pasal 495 Pergub Kaltim Nomor 43 Tahun 2023, **Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan** mempunyai tugas yakni:

- a) Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- b) Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang informasi komunikasi publik dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (2), **Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan** menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
- b) penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
- c) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis kemitraan media komunikasi publik;
- f) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang informasi komunikasi publik dan kehumasan;
- g) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik,

- pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan kemitraan media komunikasi publik; dan
- h) pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 497 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, **Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan** mempunyai uraian tugas:

- a) menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) merumuskan rancangan kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;
- f) mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi informasi komunikasi publik dan kehumasan;
- g) menyelenggarakan pengelolaan/kegiatan monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan kemitraan media komunikasi publik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;

- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas kerja dinas; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

E. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian

Berdasarkan Pergub Kaltim Nomor 43 Tahun 2023, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian** mempunyai tugas yakni:

- a) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang teknologi informasi komunikasi dan persandian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 ayat (2), **Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian** menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang teknologi informasi komunikasi dan persandian;
- b) penyiapan bahan koordinasi penyusunan, perencanaan program bidang teknologi informasi komunikasi dan persandian;
- c) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis infrastruktur teknologi informasi komunikasi;

- d) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- e) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis keamanan informasi dan persandian;
- f) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang teknologi informasi komunikasi dan persandian;
- g) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan informasi dan persandian; dan pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, **Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian** mempunyai uraian tugas:

- a) menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) merumuskan rancangan kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;

- f) mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi teknologi informasi komunikasi dan persandian;
- g) menyelenggarakan pengelolaan/kegiatan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi dan keamanan informasi dan persandian berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

F. Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA)

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 43 Tahun 2023,

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas yakni:

- a) Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian pengembangan teknis bidang aplikasi informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 ayat (2), **Bidang Aplikasi Informatika** menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Aplikasi Informatika;
- b) penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program Bidang Aplikasi Informatika;
- c) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian pengaturan teknis pengelolaan domain dan aplikasi;
- d) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian pengaturan teknis pengelolaane-government;
- e) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian pengaturan teknis pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi;
- f) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya Bidang Aplikasi Informatika;
- g) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan domain dan aplikasi, pengelolaane-government, dan pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi; dan
- h) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, **Bidang Aplikasi Informatika** mempunyai uraian tugas:

- a) menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) merumuskan rancangan kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;
- f) mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi Bidang Aplikasi Informatika;
- g) menyelenggarakan pengelolaan domain dan aplikasi, e Government dan pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

G. Bidang Statistik

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 43 Tahun 2023,

Bidang Statistik Kominfo mempunyai tugas yakni:

- a) Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat (2), **Bidang Statistik** menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Statistik;
- b) penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program Bidang Statistik;
- c) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis statistik sosial;
- d) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis statistik ekonomi;
- e) penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis statistik sumber daya alam dan infrastruktur;
- f) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya Bidang Statistik;
- g) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan statistik sosial, statistik ekonomi dan statistik sumber daya alam dan infrastruktur; dan
- h) pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, **Bidang Statistik** mempunyai uraian tugas:

- a) menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) merumuskan rancangan kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;
- f) mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi Bidang Statistik;
- g) menyelenggarakan pengelolaan/kegiatan statistik sosial, statistik ekonomi dan statistik sumber daya alam dan infrastruktur berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

1.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi/Kasubbag (terlihat pada gambar dibawah ini) :



Gambar 1. Struktur Organisasi

1.1.3. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 122 orang pegawai terdiri dari 54 orang Pegawai Negeri Sipil dan 68 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditempatkan di semua Bidang-Bidang. Untuk 122 orang Pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 2. Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2025

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah	Pria	Wanita
1	2	3	4	5	6	7
PNS						
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Madya/ IV-d	S2	1	1	-
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1	1	-
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	3	2	1
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I/ III-d	S1	-	-	-
5	Jabatan Fungsional	Pembina/ IV-a	S2	3	3	-
		Penata Tk. I / III-d	S2	5	3	2
			S1	6	3	3
		Penata / III-c	S1	2	2	2
		Penata Muda Tk. I / III-b	S1	1	0	1
	Pengatur Tingkat I / II.d	D3	2	1	1	

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah	Pria	Wanita
1	2	3	4	5	6	7
6	Jabatan Pelaksana	Penata Tk. I / III-d	S1	3	3	-
		Penata /IIIc	S1	6	3	3
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	1	1	0
			SMA	1	1	0
		Penata Muda/ III-a	S1	3	3	0
			SMA	3	1	2
		Pengatur Tk. I/ II-d	SMA	3	1	2
D3	1		-	1		
Pengatur/ II-c	SMA	2	2	0		
Jumlah				54	36	18
PPPK						
1	Jabatan Fungsional	IX	S-1	2	0	2
2	Jabatan Pelaksana	IX	S-1	50	21	29
		VII	D-3	2	1	1
		V	SMA	13	9	4
		IV	SMP	1	1	0
Jumlah				68	32	36
Jumlah Total				122	68	54

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang. Peran Dinas Kominfo Prov. Kaltim di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi

dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kalimantan Timur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- a) Menyusun masterplan Provinsi cerdas, melakukan asesment dengan Komdigi dan melakukan rapat FDG dan koordinasi dengan Kab/Kota dan prov percontohan.
- b) Pembentukan Tim Provinsi cerdas melibatkan Kab/Kota.
- c) Memetakan inovasi tiap dimensi pada PD.
- d) Melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk mendapatkan data dengan OPD
- e) Melakukan bimtek untuk melakukan services keuangan, penganggaran dan perizinan
- f) layanan software as service (SAAS)
- g) Rapat teknis dengan PD :
 1. layanan publik terintegrasi
 2. layanan informasi publik yang terintegrasi
 3. kanal laporan ayanan isu level provinsi terintegrasi
 4. modul informasi telemateri
- h) Meningkatkan jumlah Layanan yang terintegrasi melalui super app

1.3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama yang dihadapi dalam mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a) Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal
- b) Belum terciptanya layanan informasi publik yang optimalBlanspot yang masih teradi di beberapa daerah pada provinsi Kalimantan Timur dikarenakan minimnya infrastruktur telekomunikasi.
- c) Belum terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang optimal
- d) Belum tersedianya data statistik sektoral dilingkungan pemda yang berkualitas

Sehingga akar permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan pembangunan Teknologi Informatika dan komunikasi, Persandian serta Statistik ke depan adalah:

1. Masih sulitnya Akses telekomunikasi di pedesaan.
2. Belum termanfaatkan secara maksimal jaringan interoperabilitas Pemerintah.
3. Belum semua layanan (publik dan pemerintah) terdigitalisasi.
4. Masih banyak PD yang mengadakan infrastruktur TIK masing-masing.
5. Kurang mendukungnya infrastruktur untuk aplikasi data *warehouse*.
6. Belum terhubungnya jaringan kabupaten/kota ke provinsi.
7. Penanganan insiden keamanan informasi masih rendah.
8. Masih adanya PD yang belum menggunakan domain resmi sesuai peraturan daerah.
9. Kurangnya mindset digital dilevel Pimpinan.
10. Belum maksimalnya penerapan SPBE di PD.
11. Belum terintegrasi aplikasi pada beberapa PD.
12. Belum terbangunnya metadata statistik sektoral secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah daerah.
13. Kurangnya kemampuan dan keterampilan SDM pengelola data pada masing - masing produsen data.

1.4. Sarana dan Prasarana Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
2	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4
3	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
4	Bangunan Fasilitas Umum	3	Kondisi Baik/Masih Digunakan
5	Bangunan Menara Telekomunikasi	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
6	Mesin Proses	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
7	Instalasi Gardu Listrik Induk	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
8	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
9	Electric Generating Set	4	Kondisi Baik/Masih Digunakan
10	Pompa	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
11	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	21	Kondisi Baik/Masih Digunakan
12	Kendaraan Bermotor Penumpang	3	Kondisi Baik/Masih Digunakan
13	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25	Kondisi Baik/Masih Digunakan
14	Kendaraan Bermotor Khusus	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
15	Perkakas Bengkel Service	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
18	Alat Ukur Universal	7	Kondisi Baik/Masih Digunakan
19	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	6	Kondisi Baik/Masih Digunakan
20	Mesin Ketik	15	Kondisi Baik/Masih Digunakan
21	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
22	Alat Reproduksi (Penggandaan)	6	Kondisi Baik/Masih Digunakan
23	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	124	Kondisi Baik/Masih Digunakan
24	Alat Kantor Lainnya	266	Kondisi Baik/Masih Digunakan
25	Meubelair	333	Kondisi Baik/Masih Digunakan
26	Alat Pembersih	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
27	Alat Pendingin	88	Kondisi Baik/Masih Digunakan
28	Alat Dapur	341	Kondisi Baik/Masih Digunakan
29	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1614	Kondisi Baik/Masih Digunakan
30	Alat Pemadam Kebakaran	10	Kondisi Baik/Masih Digunakan
31	Meja Kerja Pejabat	58	Kondisi Baik/Masih Digunakan
32	Meja Rapat Pejabat	20	Kondisi Baik/Masih Digunakan
33	Kursi Kerja Pejabat	122	Kondisi Baik/Masih Digunakan
34	Kursi Rapat Pejabat	65	Kondisi Baik/Masih Digunakan
35	Kursi Tamu Di Ruangannya Pejabat	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
36	Lemari Dan Arsip Pejabat	37	Kondisi Baik/Masih Digunakan
37	Peralatan Studio Audio	380	Kondisi Baik/Masih Digunakan
38	Peralatan Studio Video Dan Film	623	Kondisi Baik/Masih Digunakan
39	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
40	Alat Studio Lainnya	9	Kondisi Baik/Masih Digunakan
41	Alat Komunikasi Telephone	83	Kondisi Baik/Masih Digunakan
42	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	10	Kondisi Baik/Masih Digunakan
43	Alat-Alat Sandi	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
44	Peralatan Antena Shf/Parabola	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
45	Program Input Equipment	68	Kondisi Baik/Masih Digunakan

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4
46	Sumber Tenaga	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
47	Alat Kedokteran Umum	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
48	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
49	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
50	Alat Laboratorium Umum	10	Kondisi Baik/Masih Digunakan
51	Alat Laboratorium Microbiologi	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
52	Alat Laboratorium Kimia	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
53	Alat Laboratorium Immunologi	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
54	Alat Laboratorium Film	4	Kondisi Baik/Masih Digunakan
55	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
56	Alat Laboratorium Pertanian	23	Kondisi Baik/Masih Digunakan
57	Alat Laboratorium Lain	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
58	Alat Pengukur Gelombang	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
59	Glassware Plastic/Utensils	3	Kondisi Baik/Masih Digunakan
60	Laboratory Safety Equipment	8	Kondisi Baik/Masih Digunakan
61	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
62	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
63	Modular Counting And Scientific Electronic	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
64	System/Power Supply	33	Kondisi Baik/Masih Digunakan
65	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
66	Senjata Lain-Lain	4	Kondisi Baik/Masih Digunakan
67	Alat Dalmas/Alat Dakhura	9	Kondisi Baik/Masih Digunakan
68	Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
69	Alsus Fotografi Kepolisian	5	Kondisi Baik/Masih Digunakan
70	Komputer Jaringan	21	Kondisi Baik/Masih Digunakan
71	Personal Komputer	445	Kondisi Baik/Masih Digunakan
72	Komputer Unit Lainnya	17	Kondisi Baik/Masih Digunakan
73	Peralatan Mainframe	153	Kondisi Baik/Masih Digunakan
74	Peralatan Mini Komputer	6	Kondisi Baik/Masih Digunakan
75	Peralatan Personal Komputer	298	Kondisi Baik/Masih Digunakan
76	Peralatan Jaringan	1249	Kondisi Baik/Masih Digunakan
77	Peralatan Komputer Lainnya	17	Kondisi Baik/Masih Digunakan
78	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara	8	Kondisi Baik/Masih Digunakan
79	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	13	Kondisi Baik/Masih Digunakan
80	Peralatan Permainan	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
81	Peralatan Senam	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
82	Buku Umum	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4
83	Buku Ilmu Bahasa	1000	Kondisi Baik/Masih Digunakan
84	Serial	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
85	Alat Musik	2	Kondisi Baik/Masih Digunakan
86	Lisensi Dan Frenchise	1	Kondisi Baik/Masih Digunakan
87	Software	16	Kondisi Baik/Masih Digunakan
JUMLAH		7716	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategisnya yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis Diskominfo tahun 2024-2026 yang memuat tentang kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan urusan Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, serta bidang Statistik .

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika adalah Program Diskominfo yang merupakan salah satu dari sekian program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Visi Diskominfo merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

**“TERWUJUDNYA AKSES KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
YANG BERKUALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.”**

Maksud dari visi diatas adalah “Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas” memiliki arti teknologi informasi merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan, karena dengan teknologi informasi dapat memberikan efisiensi dalam system pembangunan serta masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, disamping itu harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Kemudian visi tersebut dijabarkan kedalam misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Mengedepankan aspek system pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Peyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

Tabel 4. Perencanaan Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian S/D Th.2023	Target Kinerja Sasaran Tahun		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya layanan publik berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Indeks Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE	Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE (Tujuan)	Persen	1,75		35	
		Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Persentase PD yang masuk kategori informatif	Persen		15	25	15,7
			persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen		50	60	
		Meningkatnya maturitas dan tingkat keamanan informasi	Tingkat maturitas dan keamanan informasi	Level		3	3	
		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen		80	85	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai		75	75	70
			Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai			88	

Tabel 5. Program Prioritas Dan Kegiatan Pendukungnya

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan		
1	2	3	4	5	6		
Terwujudnya layanan publik berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE		Persen	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
						2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	1	Persentase PD yang masuk kategori informatif	Persen	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
		2	persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
						2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	Meningkatnya maturitas dan tingkat keamanan informasi	Tingkat maturitas dan keamanan informasi		Level	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
						2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan		
1	2	3	4	5	6		
	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Diskominfo Prov. Kaltim	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		2	Survei Kepuasan Masyarakat		Nilai	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
						6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang mengindikasikan pencapaian kinerja paling utama sebuah instansi pemerintah. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE	Persen	$= \frac{\text{Level kematangan yang dicapai}}{5} \times 100\%$	Kematangan SPBE, Laporan Hasil Evaluasi SPBE dari Kemenpan RB	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Sasaran : Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Persentase PD yang masuk kategori informatif	Persen	$= \frac{\text{Jumlah PD di Pemprov Kaltim kategori informatif}}{\text{Jumlah PD di Pemprov Kaltim}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	
		persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	$= \frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik di Pemprov Kaltim}} \times 100\%$	Laporan Aplikasi Terintegrasi	
3	Sasaran : Meningkatnya maturitas dan tingkat keamanan informasi	Tingkat maturitas dan keamanan informasi	Level	Hasil penilaian pengukuran pemda dengan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Versi 5.0.	Indeks KAMI	
4	Sasaran : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	$= \frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Portal Satu data Kaltim	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
5	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai	Rumus / Formulasi Perhitungan : 1. Perencanaan Kinerja (bobot 30) 2. Pengukuran Kinerja (bobot 30) 3. Pelaporan Kinerja (bobot 15) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25)	LHE APIP	
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	<p>Bobot nilai rata-rata tertimbang $= (\text{Jumlah Bobot}) / (\text{Jumlah Unsur}) = 1/X=N$</p> <p>Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur</p> <p>Bobot nilai rata-rata tertimbang $= (\text{Jumlah Bobot}) / (\text{Jumlah Unsur}) = 1/9=0.11$</p> <p>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :</p> <p>$SKM = (\text{Total dari nilai persepsi per unsur}) / (\text{Total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai penimbang}$</p>	SKM Diskominfo Prov. Kaltim	

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Tingkat Kematangan domain tata Kelola SPBE	Persen	35
2	Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Persentase PD yang masuk kategori informatif	Persen	25
		persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	60
3	Meningkatnya maturitas dan tingkat keamanan informasi	Tingkat maturitas dan keamanan informasi	Level	3
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	85
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai	75
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	88

2.3.1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp131.336.358.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi Rp167.749.485.970,- dengan rincian Belanja Operasi

Rp108.525.719.067,- dan Belanja Modal Rp59.223.766.903,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp151.682.196.467,- (90.42%) dengan rincian belanja operasi Rp94.607.086.210,- (87,17%) dan belanja Modal Rp56.894.032.057,- (96,07%).

2.3.2. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Tabel 8. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	108.525.719.067	94.607.086.210	87,17
2	Belanja Modal	59.223.766.903	56.894.032.057	96,07
Jumlah		167.749.485.970	151.682.196.467	90.42

2.3.3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	% Persentase
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	90.779.981.912	86.951.161.865	95,78
2	Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi			
3	Meningkatnya maturitas dan tingkat keamanan informasi	968.110.060	897.940.940	92,75
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	3.194.327.443	3.050.208.974	95,49
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Diskominfo Prov. Kaltim	72.807.066.555	60.782.884.688	83,48

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2024

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 60,70 (Enam Puluh Enam Koma Tujuh Puluh) atau dengan predikat penilaian “B” (Baik) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 10. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot 2023	Bobot 2024	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
				2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	30.00	22,20	20.40
2	Pengukuran Kinerja	20,00	30.00	15,40	18.00
3	Pelaporan Kinerja	10,00	15.00	6,50	8.55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,00	25.00	14,00	13.75
5	Pencapaian Kinerja	20,00	00	18,80	0.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja				76,90	60.70
				BB	B

3.1.2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
1	Melakukan Revisi dan reviu tahunan terhadap dokumen perencanaan (renja, PK, SKP) agar selaras dan konsisten dengan sasaran dan indikator Renstra, menyelenggarakan forum evaluasi perencanaan tahunan dengan notulensi formal, serta memetakan Kembali peran dan kontribusi lintas perangkat daerah untuk memastikan keterpaduan perencanaan strategis dan tahunan	1. Menyusun tim internal Renja dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	Sudah. 1. SK Renstra No. 000.7.6.1/128/Diskominfo/2025 2. SK Renja No. 700.1.1.3/138/Diskominfo/2024
		2. Merevisi dan mereviu dokumen perencanaan Renja dan Perjanjian Kinerja	Sudah. Kertas Kerja Reviu Dokumen Perencanaan Renja dan Perjanjian Kinerja
		3. Melakukan simulasi cascading tujuan-program-kegiatan-indikator agar tidak terjadi tumpang tindih	Sudah. Cascading dan Pohon Kinerja Tahun 2025
		4. Menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	Sudah. Notulen Rapat Monitoring Evaluasi Kinerja
		5. Membahas hasil capaian, hambatan, peluang perbaikan	Sudah. Rapat Tim Finalisasi Renstra dan Laporan Monev Renaksi pertriwulan
		6. Membuat notulensi formal dan rekomendasi tertulis	Sudah. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal Tahun 2025
2	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk revisi strategis, realokasi anggaran, dan anggaran, dan penyesuaian program/kegiatan, serta menmerapkan analisis kinerja secara	1. Melakukan evaluasi hasil kinerja tiap triwulan.	Sudah. Laporan Evaluasi Kinerja Pertriwulan, Laporan Monev Renaksi pertriwulan dan Laporan Realisasi Keuangan
		2. Melakukan rapat evaluasi triwulan untuk membahas capaian, kendala, dan tindak lanjut.	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
	triwulan guna menghasilkan efektivitas pengambilan Keputusan.	3. Mengidentifikasi kegiatan dengan serapan rendah atau capaian tidak optima	
3	Membentuk tin reviu internal sebelum finalisasi LkjIP, Menyusun pelaporan yang memuat perbandingan target dan realisasi, melakukan analisis efisiensi sumber daya, hambatan, Solusi. Serta kualitas capaian klinerja, mencantumkan rekomendasi perbaikan dan penugasan tindak lanjut, menjadikan LKjIP sebagai input wajibn dalam penyusunan Renja dan PK tahun berikutnya, serta meningkatkan peran pimpinan dan ASN dalam pemanfaatan laporan kinerja dan pengelolaan data e-SAKIP.	1. Melaksanakan bimbingan teknis atau internalisasi penggunaan aplikasi e-SAKIP.	Sudah. Laporan Kegiatan Bimtek Pengisian e-Sakip yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 2025
		2. Memasukkan hasil evaluasi dan rekomendasi LKjIP ke dalam penyusunan Renja Diskominfo	Sudah. Laporan Evaluasi Kinerja Pertriwulan dan Laporan Monev Renaksi pertriwulan dan Rancangan Akhir Renja Perubahan Diskominfo 2025
		3. Melakukan verifikasi dan validasi data kinerja setiap triwulan.	
4	Menyusun SKP evaluasi akuntabilitas kinerjs internal dengan tahapan sistematis dan penilaian berjenjang, mendokumentasikan hasil evaluasi yang memuat rekomendasi, jangka waktu, dan penanggung jawab tindak lanjut serta memantau dan melaporkan progress tindak lanjut secara berkala dalam rapat pimpinan	1. Menyusun dan menetapkan SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Sudah. Penyusunan SOP Evaluasi Kinerja
		2. SOP memuat tahapan evaluasi, metode penilaian, pelaksana, jadwal, dan mekanisme pelaporan	

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Oganisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup

5	< 1,8	Kurang
---	-------	--------

Sumber : Permenpan RB No.5 Tahun 2018

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE	Persen	35	76	217
<i>Capaian Kinerja Tujuan</i>						217
2	Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Persentase PD yang masuk kategori informatif	Persen	25	18,75	75
		persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	60	100	166,67
<i>Capaian Kinerja Sasaran 1</i>						120,85
3	Meningkatnya maturitas dan tingkat keamanan informasi	Tingkat maturitas dan keamanan informasi	Level	3	3	100
<i>Capaian Kinerja Sasaran 2</i>						100
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	85	100	117,65
<i>Capaian Kinerja Sasaran 3</i>						117,65
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai	75	75	100
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	81,73	92,88
<i>Capaian Kinerja Sasaran 4</i>						96,44
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						108,74

Berdasarkan tabel diatas jika diproyeksikan target untuk sasaran 4 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim tercapai

sesuai target, maka perhitungan rata-rata capaian kinerja untuk Sasaran 4 adalah sebagai berikut:

- Proyeksi Capaian Indikator: 100% (asumsi realisasi sama dengan target).
- Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4: 96,44%,

Angka ini memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap efektivitas tata kelola birokrasi di lingkungan Diskominfo Prov. Kaltim untuk periode tahun 2025, namun angka pastinya masih menunggu hasil evaluasi resmi dari Inspektorat.

Dan untuk Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran adalah 108,74%. Angka 108,74% tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian sasaran strategis yaitu “Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal” pada tahun 2025 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Analisis atas capaian indikator kinerja pada tujuan :

Tujuan : Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal

Indikator Tujuan yaitu : **“Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE”**

Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penyelenggaraan SPBE dengan Definisi Operasional Nilai

Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola sehingga terwujudnya keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik

3.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 14. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1		2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE	Persen	35	76	217
Capaian Kinerja Tujuan						217

Capaian kinerja terhadap tujuan ini berkriteria tinggi, karena terealisasi 76% dari target 35% dengan presentase capaian 217%.

3.3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 15. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2025
			Tahun 2024	Tahun 2025	
	1	2	3	4	$5 = (4/3-1)*100$
1	Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE	Persen	$3,50/5*100$ = 70	$3,80/5*100$ = 76	8,57% (Peningkatan)

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 Nomor B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025.

3.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 16. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target RPD/RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA (Th. 2026)	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5 = 3/4*100	
1	Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE	Persen	70	76	92,10

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE pada tahun 2025 telah mencapai 76% atau 92,10% hingga akhir RENSTRA 2024-2026.

3.5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tabel 17. Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Lebih Kurang
1	2	3	4	5	
1	Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE	Persen	76 (3,80)	55,2 (2,76)	20,8 (1,04)

3.5.1 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab tercapainya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Prov.Kaltim Tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Kematangan domain tata kelola SPBE

a). Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja

- Penguatan Kebijakan dan Komitmen Pimpinan
- Peran tim koordinasi SPBE, kejelasan pembagian tugas
- Proses rewiu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE telah berjalan secara berkesinambungan

- Optimalnya layanan Pusat Data dan Jaringan Intra Instansi daerah

b). Permasalahan

- Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi SDM SPBE
- Belum optimalnya pelaksanaan inovasi proses bisnis SPBE
- Belum optimalnya Integrasi perencanaan SPBE dengan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD/Renja) berkontribusi terhadap pelaksanaan SPBE yang lebih terarah dan terukur.

c). Upaya

Untuk itu Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka telah di susun berbagai upaya perbaikan antara lain:

- Pelaksanaan Literasi Digital dalam bentuk pelatihan maupun sosialisasi kepada ASN maupun Masyarakat
- Menyusun pedoman perencanaan belanja TIK dalam bentuk penerbitan rekomendasi teknis belanja TIK
- Melaksanakan Survei Layanan Digital dalam rangka perbaikan proses bisnis layanan baik Administrasi Pemerintahan maupun publik

3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 18. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Tujuan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE	98,78	95,78	3

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada tujuan sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 98,78% tercapai memerlukan serapan anggaran sebesar 95,78%. Tercapainya tujuan ini didukung oleh program APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi

Indikator 1 : Persentase PD yang masuk kategori informatif merupakan indikator yang menjadi acuan bahwa keterbukaan informasi semakin menjadi komitmen bersama di berbagai level pemerintahan maupun Lembaga dalam menjalankan penyelenggaraan negara yang *good governance*.

Indikator 2 : Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana layanan publik pemerintah telah **dilaksanakan secara digital (online)**, dan **terintegrasi antar sistem, aplikasi, atau instansi (interoperabilitas)**.

Tabel 19. Capaian Sasaran Strategis 1 (Satu)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Persentase PD yang masuk kategori informatif	Persen	25	18,75	75
		persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	60	100	166,67
<i>Capaian Kinerja Sasaran 1</i>						120,85

Capaian kinerja terhadap Sasaran ini sangat baik, karena capaian rata-rata Persentase PD yang masuk kategori informatif dan persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi mencapai 120,85% yaitu Persentase PD yang masuk kategori informatif 75% dan persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 166,67.

Tabel 20. Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2025
			Tahun 2024	Tahun 2025	
	1	2	3	4	$5 = (4/3-1)*100$
1	Persentase PD yang masuk kategori informatif	Persen	14,25	18,75	31,58% (Peningkatan)
2	persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	50	100	100% (Peningkatan)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase PD yang masuk kategori informatif mengalami peningkatan sebesar 4,5 atau 31,58%, dari 14,25 Persen menjadi 18.75 Persen, sedangkan untuk persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi juga mengalami Peningkatan (100%) atau sebanyak 50 dari 50 Persen menjadi 100 Persen.

Tabel 21. Realisasi Sasaran 1 (Satu) tahun 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA (Th. 2026)	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
	1	2	3	4	$5 = 3/4*100$
1	Persentase PD yang masuk kategori informatif	Persen	50	18,75	266,67
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	70	100	70

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase PD yang masuk kategori informatif pada tahun 2025 telah mencapai 18,75% atau 266,67% dan Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2025 telah mencapai 100% atau 70% hingga akhir RENSTRA 2024-2026, diharapkan Persentase PD yang masuk kategori informatif dan Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi terus meningkat untuk meningkatkan sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1. Indikator PD yang masuk kategori informatif

- KIP (Keterbukaan Informasi Publik) merupakan kewajiban penyelenggara negara atau perangkat daerah sebagai badan publik dalam menyediakan akses informasi yang mudah, akurat dan transparan kepada masyarakat yang dijamin oleh Undang-undangan nomor 14 tahun 2008. Tujuannya mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah untuk mencegah KKN serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam penentuan kriteria ini, ada beberapa peringkat KIP dari tingkat terendah sampai tertinggi, yaitu : kategori tidak informatif, cukup informatif, menuju informatif dan informatif. Demi mewujudkan *good governance* perangkat daerah didorong untuk mencapai kategori informatif.
- Faktor Penghambat yang mempengaruhi dalam mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dalam skala kategori informatif baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain :
 - a. Permintaan informasi publik yang lambat direspon oleh PD.
 - b. PD tidak menyediakan informasi dikecualikan.
 - c. Badan publik atau PD yang tidak patuh dalam menjalankan KIP.
 - d. PD tidak mau berpartisipasi dalam monev KIP.
 - e. Kerjasama media yang tidak mematuhi UU Pers dan Pergub Kaltim tentang Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.
 - f. Tindak lanjut terhadap pengaduan melalui SP4N Lapor oleh PD tidak tuntas.
 - g. Banyak disinformasi dan hoax terkait kinerja Pemerintah dan PD.
 - h. Minimnya publikasi melalui produksi konten positif (kinerja dan pencapaian PD) di media sosial PD.
 - i. Adanya efisiensi anggaran sehingga tupoksi bidang IKP dan Kehumasan tidak dapat diselenggarakan dengan optimal.
- Faktor Pendorong mempengaruhi dalam mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dalam skala kategori informatif baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain :
 - a. Memantau isu publik di media (media massa, media sosial dan media elektronik) dan SP4N Lapor terkait kinerja Pemprov Kaltim .
 - b. Meningkatkan strategi komunikasi publik dalam mengimbangi berita yang mengganggu kredibilitas pemerintah.
 - c. Memaksimalkan publikasi melalui media massa dan media elektronik serta media sosial.
 - d. Melakukan monitoing KIP terhadap penyelenggara negara/ badan publik/ perangkat daerah.

- e. Memaksimalkan peran KIM (komunitas informasi masyarakat) dan pranata humas dalam tugas kehumasan di Kabupaten/ Kota.
- f. Meningkatkan peran Bakohumas (badan koordinasi kehumasan).
- g. Mendorong media siber/ online lokal untuk bergabung dengan salah satu asosiasi media siber/ online di Kaltim agar media online taat dalam menjalankan fungsi jurnalistik dan memegang etika jurnalistik sesuai UU Pers dan Pergub Kaltim tentang Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.
- Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dalam skala kategori informatif baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:
 - a. Mewajibkan PD rutin dalam meng-update informasi di website PPID Pelaksana.
 - b. Mewajibkan PD melalui PPID Pelaksana melakukan uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan.
 - c. Mewajibkan PD mengikuti monev KIP yang diselenggarakan Komisi Informasi Kaltim.
 - d. Memberikan awards kepada PD yang mencapai kategori Informatif.
 - e. Komisioner KI Kaltim dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.
 - f. Menyusun strategi komunikasi publik sebagai pondasi manajemen krisis (Tim Pengelola Krisis dan Tim Komunikasi Krisis) agar pesan tersampaikan kepada publik dan tidak menimbulkan kepanikan publik.
 - g. Menjalin hubungan kerjasama dengan jaringan siber anti fitnah/ hoax untuk meningkatkan literasi digital.
 - h. Meningkatkan produksi konten positif pemerintah agar masyarakat turut mendukung program dan kebijakan pemerintah.
 - i. Melakukan kerjasama dengan media yang sudah terverifikasi Dewan Pers atau sudah berpedoman pada Pergub Kaltim tentang Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.
 - j. Dalam kondisi efisiensi, lebih memanfaatkan publikasi melalui relasi media lokal, videotron yang ada di sejumlah PD dan rumah jabatan Gubernur dan Wagub, website dan media sosial PD yang ada.
 - k. Meningkatkan publisitas Pemerintah melalui kolaborasi antar PD dalam petukaran informasi terkait kinerja dan pencapaian pemerintah melalui media sosial dan website Pemerintah Kabupaten/ Kota.
 - l. Melakukan kerjasama publikasi kemitraan dengan KIM dan pranata humas di Kabupaten/ Kota.

- m. Untuk menjalankan efisiensi, melakukan FGD, bimtek dan rapat lewat zoom online.
 - n. Untuk menjalankan efisiensi, dalam menjalankan fungsi koordinasi dan konsultasi terkait tupoksi bidang IKP (informasi komunikasi publik) melalui zoom online.
 - o. Melakukan kolaborasi, sinergi dan konsolidasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten-Kota dalam mensukseskan program agenda daerah dan nasional kegiatan yang turut melibatkan kepentingan bersama dan nasional.
 - p. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menyelenggarakan tupoksi bidang IKP dan Kehumasan.
2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
- Faktor Penghambat yang ditemui dalam mencapai Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah sebagai berikut :
 - a. Akses internet yang belum merata
 - b. Pengembangan aplikasi masih bersifat silo-silo
 - Faktor Pendorong yang mendukung dalam mencapai Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebagai berikut:
 - a. Pengembangan SuperApps SAKTI sebagai portal layanan publik Kalimantan Timur
 - b. Telah disusunnya pedoman Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
 - Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Perluasan jaringan internet hingga ke pelosok
 - b. Penyusunan pedoman pengembangan dan pembangunan aplikasi sebagai penguatan Implementasi Rencana Anggaran SPBE dalam penyusunan rencana investasi TIK berdasarkan Arsitektur SPBE

Tabel 22. Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 1 (satu).

No	Tujuan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Persentase PD yang masuk kategori informatif Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	98,78	95,78	3

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 1 sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Persentase PD yang masuk kategori informatif dan Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebesar 98,78% dapat tercapai dengan serapan anggaran 95,78% atau sebesar Rp85.951.161.865 dari Rp90.779.981.912. Artinya untuk mencapai target sasaran 1 (satu) masih bisa dilakukan efisiensi dalam mencapai capaian kinerja. Tercapainya sasaran 1 (satu) ini didukung 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Program/Kegiatan yang penunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja Sasaran 1 (Satu)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah	%	70,00	70,00	100	45.379.199.562,00	44.629.129.554,00	98,35
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	persen	85,00	85,00	100	45.379.199.562,00	44.629.129.554,00	98,35
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	1,00	1,00	100	546.374.075,00	387.788.830,00	70,97
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	275,00	275,00	100	8.181.256.730,00	8.083.974.818,00	98,81
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	100,00	100,00	100	95.559.020,00	72.234.200,00	75,59
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	88,00	88,00	100	338.641.920,00	235.082.470,00	69,42
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	88,00	88,00	100	977.049.894,00	955.070.160,00	97,75
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	2,00	2,00	100	118.375.522,00	109.958.040,00	92,89

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	1,00	1,00	100	1.709.771.601,00	1.648.029.219,00	96,39
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	30,00	30,00	100	329.068.730,00	292.919.795,00	89,01
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	15,00	15,00	100	2.871.468.650,00	2.793.247.358,00	97,28
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	12,00	12,00	100	306.054.700,00	305.505.262,00	99,82
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	135,00	135,00	100	29.905.578.720,00	29.745.319.402,00	99,46
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	%	82,00	80,00	97,56	45.400.782.350,00	41.901.954.397,00	92,29
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	%	100,00	97,30	97,3	60.688.280,00	56.607.400,00	93,28

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100	60.688.280,00	56.607.400,00	93,28
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	%	85,00	82,33	96,86	45.340.094.070,00	41.845.346.997,00	92,29
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	1,00	1,00	100	526.722.400,00	475.717.852,00	90,32
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	5,00	5,00	100	194.885.000,00	161.092.410,00	82,66
Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	1,00	1,00	100	160.748.500,00	153.567.000,00	95,53
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1,00	1,00	100	307.128.500,00	221.308.597,00	72,06
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur	Aplikasi	2,00	2,00	100	1.245.576.221,00	1.156.060.530,00	92,81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
peta rencana SPBE pemerintah daerah	dan peta rencana SPBE pemerintah daerah							
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	unit	10,00	10,00	100	93.998.000,00	57.628.511,00	61,31
Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/kota	10,00	10,00	100	12.808.412.438,00	11.352.244.246,00	88,63
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	10,00	10,00	100	3.000.000,00	1.800.000,00	60
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1,00	1,00	100	1.433.216.667,00	1.418.592.000,00	98,98

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen	1,00	1,00	100	178.080.000,00	159.345.609,00	89,48
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	1,00	1,00	100	139.068.500,00	122.363.462,00	87,99
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	1,00	1,00	100	122.357.000,00	88.773.519,00	72,55
Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Dokumen	1,00	1,00	100	80.822.000,00	22.722.000,00	28,11
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	PerangkatDaerah	37,00	37,00	100	3.796.661.466,00	3.295.949.053,00	86,81
Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	1,00	1,00	100	2.860.000,00	2.856.000,00	99,86
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1,00	1,00	100	371.455.600,00	304.254.539,00	81,91

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	1,00	1,00	100	12.242.251.584,00	11.917.879.464,00	97,35
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	perangkatdaerah	37,00	37,00	100	11.632.850.194,00	10.933.192.205,00	93,99

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Capaian program (outcome) ini adalah Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah. Capaian khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah adalah 70% dari target kinerja 70% atau kinerja terealisasi sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai 92,29 % atau sebesar Rp44.629.129.554 dari total anggaran Rp45.379.199.562.

Tercapainya Outcome Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik didukung oleh kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas dengan capaian 85% dari target kinerja 85%.

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut :

1. Anggaran publikasi tidak memadai sehingga jumlah kerjasama dengan media untuk mendiseminasikan pesan Pemerintah sangat terbatas.
2. Media khususnya Online memerlukan jaringan sehingga dengan masih kurang tersedianya jaringan di wilayah Kaltim dengan geografis yang susah dijangkau, diseminasi pesan tidak dapat terpenetrasi dengan baik kepada masyarakat khususnya daerah 3T (tertinggal, terpencil dan terluar) di Kaltim.
3. Kebutuhan jaringan juga perlu ditopang dengan ketersediaan listrik, sehingga dengan minimalnya ketersediaan listrik khusus daerah 3T Kaltim, maka diseminasi Pemerintah tidak dapat maksimal.
4. Media yang tidak mematuhi etika jurnalistik dan kode etik jurnalistik menghasilkan berita yang tidak berkualitas dan tidak akuntabel, bahkan bisa menimbulkan hoax, disinformasi dan ujar kebencian yang membahayakan publik.
5. Banyak beredarnya berita hoax, disinformasi dan ujaran kebencian yang berdampak bagi citra Pemerintah.
6. Masih banyak OPD Prov. Kaltim yang belum memaksimalkan fungsi media sosialnya untuk publikasi terkait kinerja dan pencapaian masing-masing OPD nya.

7. Fungsi Kehumasan belum maksimal melalui peran pranata humasnya.

Ada faktor pendorong dalam dalam menjalankan Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik sebagai berikut :

1. Terbitnya Pergub Kaltim no 49 tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Melakukan pemantauan melalui media monitoring terhadap isu strategis terkait kinerja Pemprov Kaltim
3. Meningkatnya penggunaan medsos publik dalam mengawasi kinerja pemerintah.
4. Permintaan terhadap publikasi melalui baleho dan videotron meningkat bersamaan dengan adanya banyak event Pemprov Kaltim
5. Meningkatnya publikasi melalui kerjasama dengan media
6. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antar Pemda dan media dalam publikasi sehingga terjalin relasi media yang harmonis.
7. Meningkatnya tugas Kehumasan di daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Masih banyak media lokal yang ingin bekerjasama dengan Pemprov Kaltim tapi belum memenuhi persyaratan sesuai UU Pers dan Pergub Kaltim tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
2. Anggaran media yang tidak bisa mengakomodir semua media lokal yang ada.
3. Konten media masih sangat minim untuk menjawab keingintahuan publik terkait kinerja dan pencapaian atau keberhasilan program dan kebijakan Pemerintah.
4. Masih banyak badan publik yang tidak menjalankan UUD KIP.
5. Masih kurangnya bimtek Pranata Humas yang diselenggarakan baik lokal maupun nasional.
6. Relasi media tidak berjalan semestinya.
7. Peran pranata humas Pemprov Kaltim tidak maksimal.

Tindakan lanjut yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah diatas diantaranya:

1. Mendorong media lokal untuk bergabung dengan asosiasi media yang berdiri di Kaltim.

2. Menyiapkan anggaran media sesuai dengan kebutuhan.
3. Menjalankan pemerintahan yang baik melalui keterbukaan informai publik dengan memaksimalkan fungsi PPID Pelaksana di semua OPD Prov. Kaltim.
4. Memproduksi konten yang menarik dan faktual serta akuntabel.
5. Meningkatkan bimtek Pranata Humas.
6. Mengembangkan relasi dengan media.
7. Meningkatkan peran pranata humas dalam melakukan pelayanan kehumasan.

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Mendorong media untuk meningkatkan profesionalitas mediana agar tersertifikasi Dewan Pers (Faktual/ Administrasi).
2. Memfasilitasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)l untuk menyelenggarakan UKW (Uji Kompetensi Wartawan).
3. Menyelenggarakan Bakohumas Prov. Kaltim.
4. Menjadikan KIM sebagai mitra dalam memproduksi konten maupun sebagai kanal informasi publik di daerah.
5. Melakukan peningkatan kompetensi bagi SDM Komunikasi Publik di daerah.
6. Melakukan kegiatan Jumpa Pers dan Liputan Media sebagai bagian dari kegiatan relasi media.
7. Menjamin ketersediaan jaringan internet dan listrik di Kaltim terutama daerah 3T.

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Program ini merupakan salah satu program prioritas, capaian program (outcome) ini adalah Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Capaian pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan public adalah 80% dari target kinerja 82% atau kinerja terealisasi sebesar 97,56% dengan realisasi keuangan mencapai 92,29 % atau sebesar Rp41.901.954.397 dari total anggaran Rp45.400.782.350.

Tercapainya Outcome Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian didukung oleh 2 kegiatan sebagai berikut:

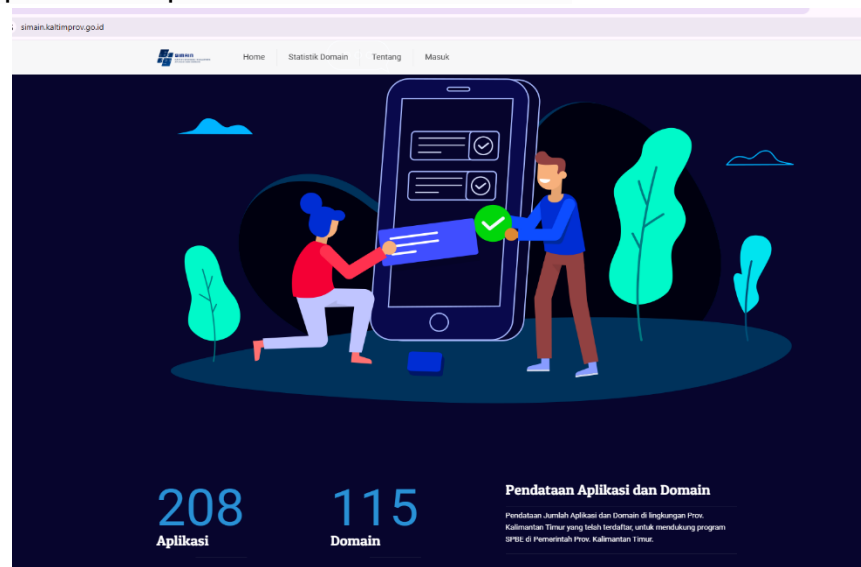
1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi kegiatan ini indikator persentase pengelolaan

nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim mempunyai indikator persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim dengan capaian 97,30% dari target kinerja 100%.

Adapun domain merupakan penamaan sistem elektronik resmi kedinasan dimana penamaannya mengacu pada aturan yang berlaku. Untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pada Surat Edaran Gubernur Kaltim nomor 067/8923/Diskominfo tanggal 27 September 2022 tentang “Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Sistem Elektronik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur”, domain resmi yang ditetapkan adalah “kaltimprov.go.id”.

Aplikasi SIMAIN adalah aplikasi berbasis web (web based). Aplikasi ini memfasilitasi Perangkat Daerah Provinsi Kaltim untuk dapat mendaftarkan semua sistem elektronik baik berupa website, aplikasi maupun sistem informasi yang dikelola. Aplikasi ini juga yang digunakan untuk mendaftarkan nama subdomain pada domain resmi pemerintah Provinsi Kaltim, sekaligus melakukan monitoring terhadap sistem elektronik yang dikelola. Adapun yang dapat dimonitor dari sistem elektronik yang terdaftar adalah jumlah traffic, kondisi/ status online dan ratingnya.

Pendataan Jumlah Aplikasi dan Domain di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang telah terdaftar dapat dilihat pada tampilan web aplikasi SIMAIN di bawah ini :



Gambar 2 : Tampilan web aplikasi SIMAIN

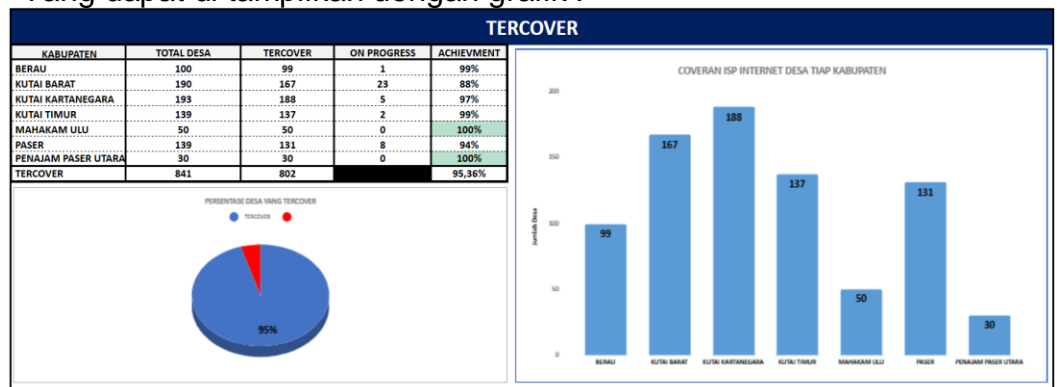
2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai indikator persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim dengan capaian 82.33% dari target kinerja 85%. Pada Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ini terdapat beberapa sub kegiatan diantara sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan ini bertujuan mengintegrasikan data dan aplikasi SPBE antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi, serta mencakup perencanaan, pemeliharaan, keamanan, dan fasilitasi jaringan. Sub kegiatan ini juga didalamnya terdapat Jaringan Intranet menghubungkan antar pemda Kab/Kota dan Penyelenggaraan internet desa untuk data lebih detail diamati pada tabel berikut :

Tabel 24. Penyelenggaraan internet desa

No	Kabupaten	Fiber Optic	Cellular	Satelite	Waiting	Total
1	Berau	57	24	18	1	100
2	Kutai Barat	61	26	80	23	190
3	Kutai Kartanegara	111	29	48	5	193
4	Kutai Timur	84	31	22	2	139
5	Mahakam Ulu	3	7	10	30	50
6	Paser	97	11	23	8	139
7	Penajam Paser Utara	26	3	1		30
Total		439	131	202	69	841

Yang dapat di tampilkan dengan grafik :



Grafik 1. Penyelenggaraan internet Desa

2. Sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi yang bertujuan membangun jaringan komunikasi tertutup yang aman, efisien, dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Ini bertujuan mendukung layanan publik terpadu, menjamin keamanan data, meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan kualitas layanan berbasis elektronik (SPBE). untuk data lebih detail diamati pada tabel berikut :

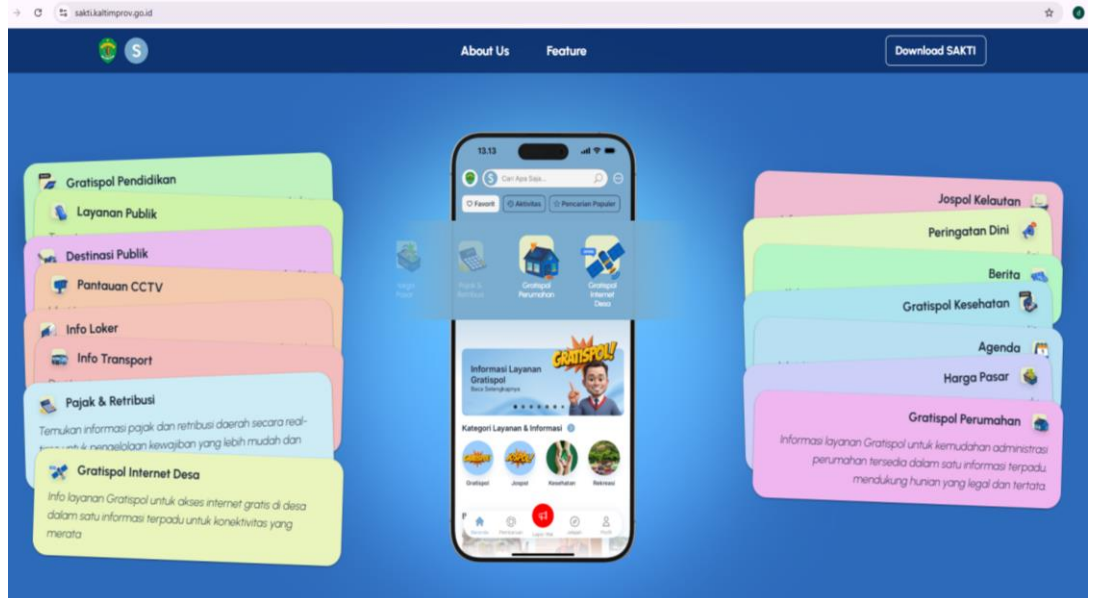
Tabel 25. Fasilitas akses internet Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

No	Perangkat Daerah	Fasilitas Akses Internet	
		Jenis / Layanan Jaringan	Alokasi Bandwidth
1	BAPELKES Kaltim	METRO	100 Mbps
2	Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	METRO	100 Mbps
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	METRO	100 Mbps
4	Satuan Polisi Pamong Praja	METRO	100 Mbps
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	METRO	100 Mbps
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	METRO	100 Mbps
7	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	METRO	100 Mbps
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	METRO	100 Mbps
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	METRO	100 Mbps
10	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	METRO	100 Mbps
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	METRO	100 Mbps
12	Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	METRO	100 Mbps
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	METRO	100 Mbps
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	METRO	100 Mbps
15	Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur	METRO	100 Mbps
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	METRO	100 Mbps
17	Balitbangda	METRO	100 Mbps
18	Dinas Kehutanan	METRO	100 Mbps

No	Perangkat Daerah	Fasilitas Akses Internet	
		Jenis / Layanan Jaringan	Alokasi Bandwidth
19	Bapenda	METRO	100 Mbps
20	Inspektorat kantor gubernur	METRO	100 Mbps
21	Dinas Kesehatan	METRO	100 Mbps
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	METRO	100 Mbps
23	Dinas Perternakan	METRO	100 Mbps
24	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	METRO	100 Mbps
25	BPSDM	METRO	100 Mbps
26	DISHUB PROVINSI KALTIM	METRO	100 Mbps
27	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	METRO	100 Mbps
28	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Anak	METRO	100 Mbps
29	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	METRO	100 Mbps
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	METRO	100 Mbps
31	RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo	METRO	100 Mbps
32	RSUD Abdul Wahab Sjahranie	METRO	100 Mbps
33	Gubernur Kalimantan Timur	METRO	100 Mbps
34	RS MATA	METRO	100 Mbps
35	RS Korpri	METRO	100 Mbps

3. Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan indikator Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional dan target 1 (satu) Layanan. Layanan tersebut adalah berupa aplikasi Satu Akses Kalimantan Timur Menuju Generasi Emas (Sakti Gemas) yang merupakan *super app* resmi dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik, informasi strategis, serta program unggulan seperti "Gratispol" dan "Jospol" dalam satu platform digital. Peluncuran aplikasi tersebut berlangsung dalam Konser Merah Putih di Gelora Kadrie Oening Samarinda pada hari Minggu, 17 Agustus 2025 sekaligus Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025. Aplikasi ini bersifat ringan (~27 MB) dan dapat diunduh gratis melalui Play Store dan App Store. Sakti Gemas bertujuan

meningkatkan efisiensi birokrasi dan partisipasi masyarakat dalam era digital.



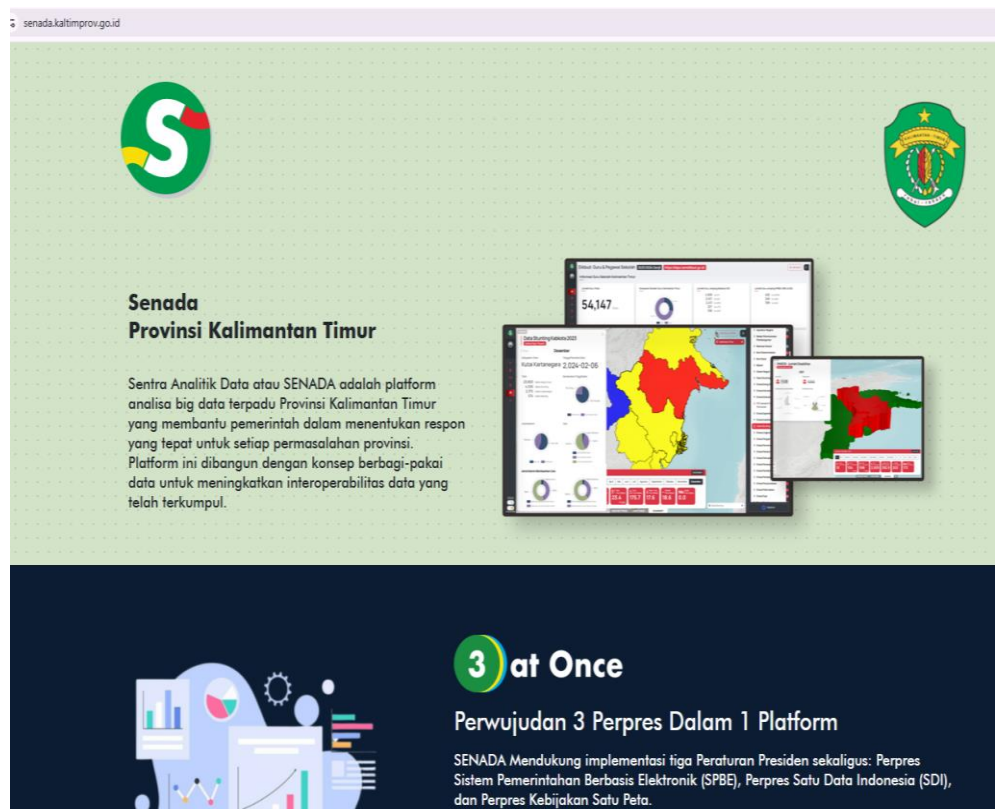
Gambar 3 : Tampilan *super app* (Sakti Gemas)

4. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah bertujuan Tujuan utama sub kegiatan pembangunan/pengembangan aplikasi khusus yang sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE adalah mewujudkan layanan digital terintegrasi, efisien, dan aman. Ini mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar nasional. Indikator untuk Sub kegiatan ini adalah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah yaitu :

- a. Senada Provinsi Kalimantan Timur (<https://senada.kaltimprov.go.id/>)

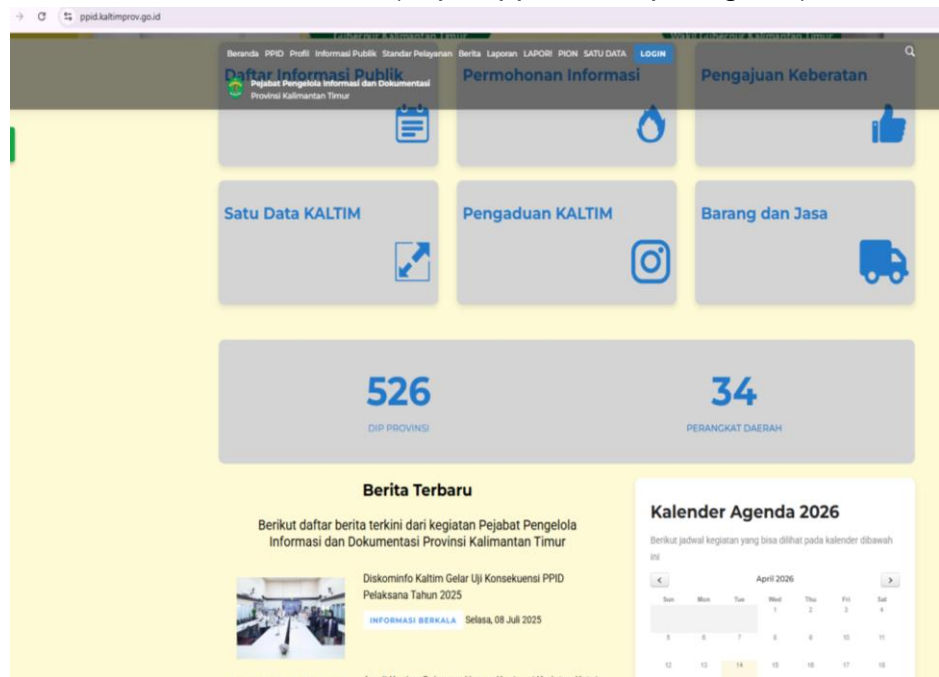
Sentra Analitik Data atau SENADA adalah platform analisa big data terpadu Provinsi Kalimantan Timur yang membantu pemerintah dalam menentukan respon yang tepat untuk setiap permasalahan provinsi. Platform ini dibangun dengan konsep berbagi-pakai data untuk meningkatkan interoperabilitas data yang telah terkumpul. Perwujudan 3 Perpres Dalam 1 Platform SENADA Mendukung implementasi tiga Peraturan Presiden sekaligus: Perpres

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Satu Data Indonesia (SDI), dan Perpres Kebijakan Satu Peta Platform Big Data SENADA mengakuisisi semua jenis data mulai dari data statistik terstruktur, data tidak terstruktur hingga integrasi IoT dengan konsep pengelolaan Big Data Analitik untuk menentukan respon yang tepat. Dengan analitik canggih, platform ini mengidentifikasi tren dan pola untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, menjadikan pemerintahan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Gambar 4 : Tampilan Senada

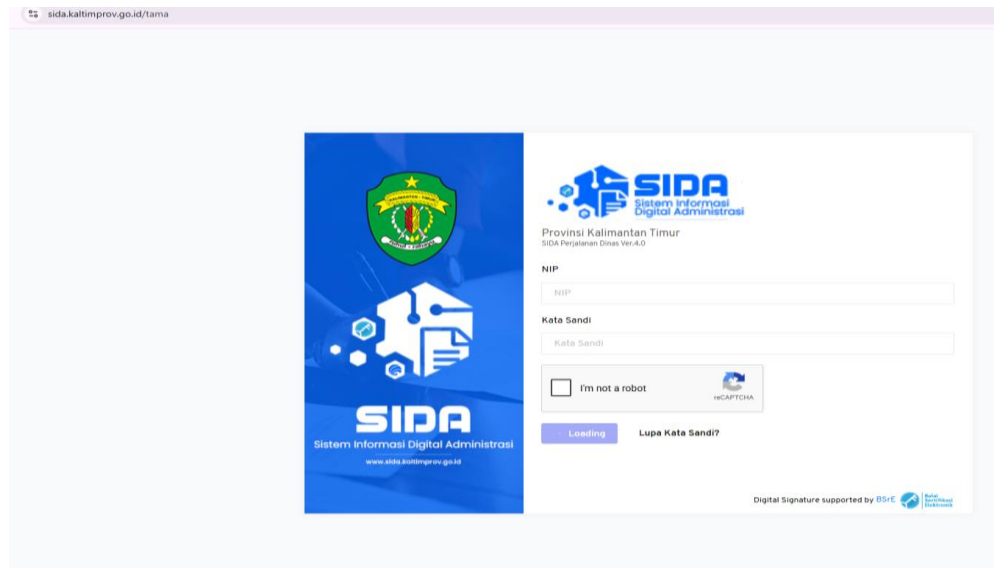
b. Website PPID Prov Kaltim (<https://ppid.kaltimprov.go.id/>)



Gambar 5 : Tampilan Website PPID Prov Kaltim

c. SIDA Kaltim (Sistem Informasi Digital Administrasi) <https://sida.kaltimprov.go.id/tama>

SIDA Kaltim (Sistem Informasi Digital Administrasi) adalah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan oleh Pemprov Kalimantan Timur untuk mendigitalisasi administrasi pemerintahan, terutama untuk efisiensi perjalanan dinas (SIDA JALDIS) secara *paperless*. Aplikasi ini mendukung tanda tangan elektronik (TTE) dan terintegrasi dengan sistem kearsipan dinamis. SIDA Kaltim merupakan sistem yang digunakan untuk memangkas birokrasi konvensional, membuat pengajuan dan pelaporan perjalanan dinas menjadi lebih cepat, transparan, dan *real-time*.



Gambar 6 : Tampilan Website SIDA Kaltim

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

1. Masih adanya aplikasi yang belum menggunakan domain resmi "kaltimprov.go.id"
2. Akses internet yang belum merata
3. Pengembangan aplikasi masih bersifat silo-silo
4. Masih kurangnya SDM berlatar belakang IT

Ada faktor pendorong dalam dalam menjalankan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

1. Pengembangan SuperApps SAKTI sebagai portal layanan publik Kalimantan Timur
2. Telah disusunnya pedoman Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
3. Internet Desa

Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Penggunaan domain "kaltimprov.go.id" dianggap berpengaruh terhadap keamanan data
2. Belum seluruh wilayah di Kalimantan Timur dijangkau oleh layanan internet
3. Clearance Anggaran Belanja TIK belum sepenuhnya dilaksanakan
4. Kompetensi SDM IT belum sesuai dengan kebutuhan teknologi terbaru

Tindaklanjut yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah diatas diantaranya:

1. Masih perlunya pendekatan dan sosialisasi lebih lanjut untuk penggunaan domain “kaltimprov.go.id”
2. Penyediaan akses internet secara bertahap
3. Perlu disusunnya regulasi pelaksanaan rencana dan anggaran belanja TIK
4. Peningkatan kompetensi SDM IT dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis dan sertifikasi bidang IT maupun rekrutmen tenaga teknis

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut::

1. Perlunya peran pengawasan dari unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal
2. Kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kota dalam penyediaan akses internet yang merata
3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam peningkatan Kompetensi SDM IT

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan maturitas dan tingkat keamanan informasi

Indikator : Tingkat maturitas dan keamanan informasi merupakan Hasil penilaian pengukuran pemda dengan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Versi 5.0. Pemerintah Daerah melakukan self assessment, BSSN akan melakukan verifikasi atas hasil self assessment tersebut. Penetapan target daerah mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya.

Tabel 26. Capaian Sasaran Strategis 2 (Dua)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya maturitas dan tingkat keamanan informasi	Tingkat maturitas dan keamanan informasi	Level	3	3	100
<i>Capaian Kinerja Sasaran 2</i>						100

Capaian kinerja terhadap Sasaran ini sangat baik, karena capaian realisasi Tingkat maturitas dan keamanan informasi sesuai dengan target yang ditentukan yaitu terdefinisi level 3.

Tabel 27. Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2025
			Tahun 2024	Tahun 2025	
	1	2	3	4	$5 = (4/3-1)*100$
1	Tingkat maturitas dan keamanan informasi	Level	3	3	0

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penilaian Mandiri Indeks KAMI versi 5.0 dan IKAS+ yang telah dibuat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 s.d.16 Juli 2025 secara daring Tingkat maturitas dan keamanan informasi tidak mengalami Perubahan dari Tahun 2024 yaitu tetap terdefinisi level 3 namun tetap sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tingkat Kematangan Keamanan Siber					2024		
Kategori SE: Tinggi					Kategori Tingkat Kematangan per-Domain		
	Target Nilai Kematangan	Nilai Kematangan	Nilai Kematangan per-Domain	Kategori Tingkat Kematangan per-Domain	Kategori Tingkat Kematangan Keamanan Siber		
Total	2,51	2,52			Level 3 - Terdefinisi		
Strategi	Mengiden efikasi Peran dan tanggung jawab organisasi siber	2,51	2,57	2,15			Level 2 - Berulang
	Menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur keamanan siber	2,51	2,39				
	Mengelola aset informasi	2,51	1,89				
	Menilai dan mengelola risiko Keamanan Siber	2,51	2,38				
	Mengelola risiko rantai pasok	2,51	1,60				
Proteksi	Mengelola identitas, autentikasi, dan kendali akses	2,51	2,60	2,48			Level 2 - Berulang
	Melindungi aset fisik	2,51	3,44				
	Melindungi data	2,51	0,72				
	Melindungi aplikasi	2,51	2,00				
	Melindungi jaringan	2,51	3,14				
Deteksi	Melindungi sumber daya manusia	2,51	3,00	2,38			Level 2 - Berulang
	Mengelola deteksi Peristiwa Siber	2,51	2,75				
	Menganalisis anomali dan Peristiwa Siber	2,51	2,33				
Pemulihan Insiden dan Pencegahan	Memantau Peristiwa Siber berkelanjutan	2,51	2,00	3,22			Level 3 - Terdefinisi
	Menyusun perencanaan penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber	2,51	3,54				
	Menganalisis dan melaporkan Insiden Siber	2,51	4,00				
	Melaksanakan penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber	2,51	2,33				
	Meningkatkan keamanan setelah terjadinya Insiden Siber	2,51	3,00				

Gambar 7. Penilaian Indeks KAMI versi 5.0 dan IKAS+ secara luring

Tabel 28. Realisasi Sasaran 2 (Dua) tahun 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA (Th. 2026)	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5 = 3/4*100	
1	Tingkat maturitas dan keamanan informasi	Level	3	3	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat maturitas dan keamanan informasi pada tahun 2025 telah terdefinisi level 3, diharapkan Tingkat maturitas dan keamanan informasi terus meningkat levelnya.

- Faktor Penghambat yang ditemui dalam mencapai Tingkat maturitas dan keamanan informasi adalah sebagai berikut :
 1. Faktor sarana dan prasarana belum memadai yang dilatarbelakangi keterbatasan anggaran dan masih tingginya ego sektoral dan masih kurangnya kesadaran terhadap keamanan data
 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian
 3. Keterbatasan SDM dengan kompetensi bidang tik dan teknologi informasi dan komunikasi yang belum merata
 4. peserta kegiatan berbeda dengan yang berada di lapangan

- Faktor Pendorong yang mendukung dalam mencapai Tingkat maturitas dan keamanan informasi adalah sebagai berikut :
 - a. Tersedianya kegiatan komunikasi intra pemerintah (berbasis suara, video, teks dan lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah
 - b. Terpasangnya Perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi
 - c. Capaian Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - d. Capaian Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - e. Capaian Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi

- f. Tersedianya Anggaran dalam melakukan koordinasi ke perangkat daerah
 - g. Capaian operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
- Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
- a. Peningkatan anggaran untuk meningkatkan komunikasi intra pemerintah (berbasis suara, video, teks dan lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah
 - b. Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (integritas), dan Availability (Ketersediaan)
 - c. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi
 - d. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan kota
 - e. Persandian tiap tahun melakukan kegiatan bimtek secara rutin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan
 - f. memberikan kesadaran bahwa peserta juga berkewajiban melaksanakan keamanan informasi

Tabel 29. Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 2 (Dua).

No	Tujuan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Meningkatnya maturitas dan tingkat keamanan informasi	Tingkat maturitas dan keamanan informasi	100	92,75	7,25

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 2 sebesar 7,25%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tingkat maturitas dan keamanan informasi sebesar 100% dapat tercapai dengan serapan anggaran 92,75% atau sebesar Rp897.940.940 dari Rp968.110.060. Artinya untuk mencapai target sasaran 2 (dua) masih bisa dilakukan efisiensi dalam mencapai capaian kinerja. Tercapainya sasaran 2 (dua) ini didukung oleh Program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30. Program/Kegiatan yang penunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja Sasaran 2 (Dua)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat	3,00	3,00	100	968.110.060,00	897.940.940,00	92,75
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	%	100,00	90,46	90,46	839.367.911,00	772.503.586,00	92,03
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	1,00	1,00	100	40.169.788,00	22.670.888,00	56,44
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1,00	1,00	100	85.534.000,00	83.970.237,00	98,17
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1,00	1,00	100	671.188.123,00	623.977.896,00	92,97
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	37,00	37,00	100	42.476.000,00	41.884.565,00	55,87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Pemerintah Daerah Provinsi								
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	%	85,00	83,12	97,79	128.742.149,00	125.437.354,00	97,43
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	37,00	34,00	91,89	128.742.149,00	125.437.354,00	97,43

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Capaian program (outcome) ini adalah Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah. Capaian Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah adalah 70% dari target kinerja 70% atau kinerja terealisasi sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai 92,29 % atau sebesar Rp44.629.129.554 dari total anggaran Rp45.379.199.562.

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran sertifikat elektronik / tte tidak terlalu mudah.
2. Perlu perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSSN
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keamanan informasi dapat menghambat upaya untuk melakukan upaya-upaya pengamanan informasi.
4. Penerapan Keamanan Informasi yang sesuai standar ISO 27001:2022 masih kurang dan perlunya kegiatan auditor internal training
5. Kurangnya Dokumen pendukung untuk persiapan external auditor ISO 27001:2022.
6. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia(SDM) khususnya bagian keamanan informasi dan persandian.

Ada faktor pendorong dalam dalam menjalankan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebagai berikut :

1. Pengelolaan TTE sudah berjalan sejak 2021
2. Kesadaran yang meningkat tentang pentingnya keamanan informasi di seluruh organisasi mendorong upaya untuk melakukan edukasi dan pelatihan terkait keamanan informasi untuk meningkatkan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan keamanan
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat seperti kegiatan awareness training ISO 27001:2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam pemahaman kemanan informasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Proses pendaftaran sertifikat elektronik (TTE) yang masih relatif kompleks dan memerlukan waktu.
2. Perlunya perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSSN guna menjamin keberlanjutan layanan.

3. Tingkat pemahaman dan kesadaran (awareness) Pegawai terhadap keamanan informasi yang belum merata.
4. Implementasi ISO 27001:2022 yang belum optimal, termasuk belum tersedianya SDM auditor internal yang memadai.
5. Keterbatasan dokumen dalam rangka persiapan audit eksternal ISO 27001:2022.

Tindak Lanjut yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah diatas diantaranya:

1. Melaksanakan pendampingan dan fasilitasi kepada perangkat daerah dalam proses pendaftaran sertifikat elektronik (TTE).
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan BSSN terkait rencana perpanjangan PKS.
3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan awareness training keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pegawai.
4. Mendorong penerapan kebijakan dan prosedur keamanan informasi sesuai dengan standar ISO 27001:2022.
5. Menyelenggarakan kegiatan internal auditor training kepada pegawai dan pelaksanaan internal audit di lingkungan Diskominfo.
6. Melakukan identifikasi dan penyusunan dokumen-dokumen pendukung sebagai dari persiapan audit eksternal agar mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2022.

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut::

1. Penguatan sistem layanan TTE agar lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah.
2. Menyusun perencanaan dan timeline perpanjangan PKS dengan BSSN
3. Pelaksanaan awareness training dan auditor training untuk keamanan informasi kepada Pegawai dilakukan secara berkala.
4. Penyusunan action plan pemenuhan dokumen dan pengumpulan dokumen pendukung sesuai persyaratan ISO 27001:2022 dan melakukan review internal secara berkala.
5. Monitoring dan evaluasi penerapan kontrol keamanan dalam implementasi ISO 27001:2022.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral

Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah perbandingan jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan total jumlah Perangkat Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Tabel 31. Capaian Sasaran Strategis 3 (Tiga)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	85	100	117,65
<i>Capaian Kinerja Sasaran 3</i>						117,65

Capaian kinerja terhadap Sasaran ini sangat baik, karena capaian realisasi Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sangat melebihi dari target yang ditentukan yaitu 85% dengan realisasi 100% .

Tabel 32. Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2025
			Tahun 2024	Tahun 2025	
	1	2	3	4	$5 = (4/3-1)*100$
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	80	100	25% (Peningkatan)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah mengalami peningkatan sebesar 25%, dari 80 Persen menjadi 100 Persen.

Tabel 33. Realisasi Sasaran 2 (Dua) tahun 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA (Th. 2026)	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5 = 3/4*100	
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	90	100	90

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 telah melebihi dari target Renstra.

- Faktor Penghambat yang ditemui dalam mencapai Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah Keterbatasan SDM pada Instansi/Perangkat Daerah untuk menyediakan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
- Faktor Pendorong yang mendukung dalam mencapai Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah Portal Satu Data Provinsi Kalimantan Timur dan Portal Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi Kalimantan Timur bersifat Open Data sehingga data yang tersedia dapat diakses oleh setiap orang.
- Upaya yang dapat dilakukan yaitu Melakukan peningkatan Kapasitas SDM dan ketersediaan data melalui kegiatan seperti :
 - a. Menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Data Statistik Sektor dan Informasi Geospasial bersama dengan BPS dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selaku Pembina Data untuk mendapatkan Data Statistik Sektor dan Informasi Geospasial yang berkualitas dan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

- b. Melakukan Peremajaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Metadata Statistik agar lebih mudah digunakan oleh Produsen Data dalam menghasilkan Metadata untuk memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia
- c. Menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Statistik (Data Scientist) untuk meningkatkan kompetensi teknis pegawai di Bidang Statistik

Tabel 34. Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 3 (Tiga).

No	Tujuan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	95,49	4,51

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 3 sebesar 4,51%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dapat tercapai dengan serapan anggaran 95,49% atau sebesar Rp3.050.208.974 dari Rp3.194.327.443. Artinya untuk mencapai target sasaran 3 (tiga) masih bisa dilakukan efisiensi dalam mencapai capaian kinerja. Tercapainya sasaran 3 (tiga) ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 35. Program/Kegiatan yang penunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja Sasaran 3 (Tiga)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	%	85,00	85,00	100	3.194.327.443,00	3.050.208.974,00	95,49
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	persen	85,00	85,00	100	3.194.327.443,00	3.050.208.974,00	95,49
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	100,00	100,00	100	843.367.361,00	798.521.681,00	94,68
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	70,00	70,00	100	358.340.702,00	312.404.602,00	74,29
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	100,00	100,00	100	958.754.392,00	918.946.851,00	95,85
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	1,00	1,00	100	521.466.372,00	515.879.472,00	98,93
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	1,00	1,00	100	512.398.616,00	504.456.368,00	98,45

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Capaian program (outcome) ini adalah Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data adalah 85% dari target kinerja 85% atau kinerja terealisasi sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai 95,49 % atau sebesar Rp3.050.208.974 dari total anggaran Rp3.194.327.443.

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penyelenggaraan Statistik Sektorale sebagai berikut :

1. Terdapat pengajuan usulan kegiatan statistik sektoral yang memerlukan perbaikan oleh Perangkat Daerah
2. Perlunya identifikasi data variabel yang dibutuhkan dalam menyusun metadata kegiatan statistik sektoral oleh Perangkat Daerah
3. Perlunya update firmware dan software secara berkala pada Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur
4. Perlunya update firmware dan software secara berkala pada Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kalimantan Timur dan Geonetwork (Metadata Geospasial).

Ada faktor pendorong dalam dalam menjalankan Program Penyelenggaraan Statistik Sektorale sebagai berikut :

1. Terbitnya Pergub Kaltim No.12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Perlunya pendataan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur melalui Aplikasi Romantik BPS RI
3. Perlunya ketersediaan metadata kegiatan statistik sektoral berdasarkan kegiatan statistik sektoral yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah
4. Perlunya pengelolaan Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur dan subsistem pendukungnya untuk terwujudnya sistem yang andal dan dapat dibagipakaikan.
5. Perlunya pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kalimantan Timur dan Geonetwork (Metadata Geospasial) untuk terwujudnya sistem yang andal dan dapat dibagipakaikan

Permasalahan yang dihadapi yaitu memastikan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan , dan evaluasi kinerja instansi berjalan dengan efektif dan efisien

Tindaklanjut yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah diatas yaitu membuat tahapan perencanaan, pelaksanaan , dan evaluasi kinerja instansi berjalan dengan efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik Diskominfo Prov. Kaltim

Indikator sasaran strategis 4 (empat) adalah :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim
2. Survei Kepuasan Masyarakat

Akuntabilitas kinerja mencerminkan sejauh mana perangkat daerah mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka secara transparan, efektif, dan efisien, serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kepuasan masyarakat mengukur sejauh mana pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga. Kepuasan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kecepatan pelayanan, kualitas layanan, keterbukaan informasi, serta responsivitas terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat. Meningkatkan kedua aspek ini, perangkat daerah perlu menerapkan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang berbasis hasil, memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta mengembangkan inovasi pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 36. Capaian Sasaran Strategis 4 (empat)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai	75	75	100
		Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	81,73	92,88
<i>Capaian Kinerja Sasaran 4</i>						96,44

Jika diproyeksikan target untuk sasaran 4 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim tercapai sesuai target, maka perhitungan rata-rata capaian kinerja untuk Sasaran 4 adalah sebagai berikut:

- Proyeksi Capaian Indikator: 100% (asumsi realisasi sama dengan target).
- Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4: 96,44%,
 Angka ini memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap efektivitas tata kelola birokrasi di lingkungan Diskominfo Prov. Kaltim untuk periode tahun 2025, namun angka pastinya masih menunggu hasil evaluasi resmi dari Inspektorat. Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini baik, karena capaian rata-rata Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat mencapai 96,44 % dengan capaian nilai akuntabilitas sebesar 100% dan Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 92,88%.

Tabel 37. Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2025
			Tahun 2024	Tahun 2025	
	1	2	3	4	$5 = (4/3-1)*100$
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai	60,70	75 (Estimasi) (Menunggu Penilaian dari Inspektorat)	23,56
2	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,25	81,73	-1,83

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim (Masih estimasi) mengalami peningkatan poin sebesar 23,56 dan survey Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan poin sebesar -1,83 (Penilaian Nilai Akuntabilitas Kinerja atau SAKIP tahun 2024 dan 2025 memiliki perbedaan bobot poin penilaian

Tabel 38. Realisasi Sasaran 4 (empat) tahun 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA (Th. 2026)	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5 = 3/4*100	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai	80	75 (Estimasi) (Menunggu Penilaian dari Inspektorat)	106,67
2	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	81,73	108,15

Dari tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 (estimasi) 75 sedangkan target Akhir Renstra nilai sebesar 80 sehingga realisasi sudah dianggap mencapai target akhir Renstra dan diharapkan akan terus memperbaiki akuntabilitas pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025 mencapai nilai 81,73 dan diharapkan agar terus meningkat pada tahun selanjutnya.

Tabel 39. Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4 (empat).

No	Tujuan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim	—	83,48	5,12
		Survei Kepuasan Masyarakat	81,73	83,48	5,12

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4 sebesar 5,12%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim dan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 98,78% dapat tercapai dengan serapan anggaran 83,48% atau sebesar Rp60.782.884.688 dari Rp72.807.066.555. Artinya untuk mencapai target sasaran 4 (empat)

masih bisa dilakukan efisiensi dalam mencapai capaian kinerja. Tercapainya sasaran 4 (empat) ini didukung oleh program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 40. Program/Kegiatan yang penunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja Sasaran 4 (empat)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	persen	100,00	88,60	88,6	72.807.066.555,00	60.782.884.688	83,48
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	indeks	100,00	88,60	88,6			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	persen	100,00	95,00	95	341.779.300,00	324.600.820,00	94,97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100	125.820.650,00	118.462.171,00	94,15
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	44.838.000,00	43.607.401,00	97,26
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	9.120.650,00	8.520.000,00	93,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	84.600.000,00	76.624.542,00	90,57
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	100	77.400.000,00	77.386.706,00	99,98

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	persen	100,00	70,00	70	27.305.451.835,00	17.590.202.704,00	64,42
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	140,00	122,00	87,14	26.506.300.509,00	16.911.250.183,00	63,8
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	1,00	100	2.146.964,00	1.920.000,00	89,43
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	729.070.000,00	610.041.700,00	83,67
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	1,00	100	8.834.756,00	8.529.471,00	96,54
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	27.199.606,00	26.837.750,00	98,67
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	1,00	100	31.900.000,00	31.623.600,00	99,13
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	persen	100,00	100,00	100	16.933.680,00	16.633.100,00	98,22
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	5.644.560,00	5.643.000,00	99,97

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Barang Milik Daerah SKPD								
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	5.644.560,00	5.523.000,00	97,85
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	5.644.560,00	5.467.100,00	96,86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	persen	100,00	85,12	85,12	54.970.760,00	50.510.000,00	91,89
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	100	5.820.760,00	3.620.000,00	62,19
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	1,00	100	5.200.000,00	4.800.000,00	92,31
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5,00	5,00	100	33.300.000,00	32.400.000,00	97,3
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50,00	50,00	100	10.650.000,00	9.690.000,00	90,99

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	persen	100,00	92,11	92,11	1.491.756.472,00	1.379.314.743,00	92,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	40.437.820,00	40.265.000,00	99,57
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	7,00	100	155.653.486,00	150.127.900,00	96,45
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	100	132.766.366,00	132.605.745,00	99,88
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	1.133.378.800,00	1.035.636.098,00	91,38
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	29.520.000,00	20.680.000,00	70,05
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	persen	100,00	98,00	98	36.555.043.484,00	34.794.648.327,00	95,18
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	1,00	100	39.877.000,00	39.260.000,00	98,45
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3,00	3,00	100	507.973.017,00	500.920.800,00	98,61

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	140,00	140,00	100	36.007.025.567,00	34.254.467.527,00	95,13
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	167.900,00	0,00	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	persen	100,00	98,21	98,21	5.589.425.953,00	5.266.057.726,00	94,21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	100	16.736.000,00	16.199.100,00	96,79
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	543.949.100,00	514.170.764,00	94,53
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	260.962.000,00	259.739.578,00	99,53
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	4.767.778.853,00	4.475.948.284,00	93,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	persen	100,00	93,41	93,41	1.451.705.071,00	1.360.917.268,00	93,75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36,00	36,00	100	673.015.999,00	602.789.618,00	89,57

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	1.430.000,00	1.400.000,00	97,9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	2,00	100	245.779.072,00	244.327.650,00	99,41
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	531.480.000,00	512.400.000,00	96,41

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 2 (dua) outcome, Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti dan Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian. Realisasi Capaian Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti pada Dinas mencapai 88,60% yang berarti menunjukkan bahwa instansi secara umum telah memberikan pelayanan yang baik, namun masih memiliki ruang untuk optimalisasi menuju pelayanan prima, program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu dengan capaian 95% dari target 95% atau capaian 100%. Terdapat beberapa dokumen yang disusun tepat waktu. Dokumen yang telah disusun tepat waktu adalah RENSTRA 2025-2029, RENJA 2025, Perjanjian Kinerja, IKU 2025, DPA, RKA, Rencana Aksi, Pohon Kinerja dan Casecading, LHE dan TLHE AKIP, dan Pengukuran Kinerja.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi Indikator Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu yaitu 70% dari target 100 %, dengan capaian realisasi keuangan menurut konsolidasi Bersama BPKAD per 31 Desember 2025 adalah 90,42%, terdapat selisih perbedaan dari aplikasi SIPD dan aplikasi SIRA pada hasil akhir realisasi keuangan. Aplikasi SIPD 90,42% SIRA 89,96%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Realisasi capaian Indikator Persentase BMD yang berfungsi dengan baik BMD 100% dari target 100%.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Realisasi Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang) 85,12% dari target 100 Persen. Terdapat 61 orang pegawai dinas yang mengikuti peningkatan SDM.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah 92,11 % dari target 100% atau capaian 92,11%, sehingga administrasi umum berjalan dengan baik selama tahun 2025.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor 98% dari target 100%. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki jumlah BMD asset tetap 5725 dan BMD asset lainnya 17.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Daerah 98,21% dari target 100%. Pada Tahun terdapat 2.004 naskah surat masuk dan 1.233 naskah surat keluar

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi capaian Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor 93,41% dari target 100%

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut :

1. Perubahan indikator program, efisiensi anggaran
2. Adanya perubahan penilaian SAKIP sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022.
3. Kurangnya keterampilan dan pemahaman staf terhadap proses administrasi keuangan dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
4. Kurangnya pelatihan dan pemahaman staf tentang kebijakan administrasi umum dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan

Ada faktor pendorong dalam dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut :

1. Penerapan teknologi informasi yang memadai telah memudahkan Pengukuran dan pemantauan indikator kinerja, yang pada gilirannya mendorong peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja.
2. transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
3. Keberadaan kebijakan dan prosedur kepegawaian yang jelas dan terstandarisasi
4. Penerapan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan
5. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki
6. Pengelolaan inventaris BMD yang baik

Adapun upaya dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan peran PPID (Paejabat Pengelola Informasi Publik)Pembantu.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui Diklat
3. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp131.336.358.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi Rp167.749.485.970,- dengan rincian Belanja Operasi Rp108.525.719.067,- dan Belanja Modal Rp59.223.766.903,-.

Tabel 41. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	108.525.719.067	94.607.086.210	87,17
2	Belanja Modal	59.223.766.903	56.894.032.057	96,07
Jumlah		167.749.485.970	151.682.196.467	90.42

Dari tabel di atas realisasi anggaran sebesar Rp151.682.196.467,- (90.42%) dengan rincian belanja operasi Rp94.607.086.210,- (87,17%) dan belanja Modal Rp56.894.032.057,- (96,07%).

3.4.1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Tingkat Kematangan domain tata kelola SPBE	35	76	217	90.779.981.912	86.951.161.865	95,78
2	Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Persentase PD yang masuk kategori informatif	25	18,75	75			
		persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60	100	166,67			
3	Meningkatnya maturitas dan tingkat keamanan informasi	Tingkat maturitas dan keamanan informasi	3	3	100	968.110.060	897.940.940	92,75
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	85	100	117,65	3.194.327.443	3.050.208.974	95,49

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memiliki 4 (lima) sasaran kinerja, yang termasuk dalam sasaran strategis adalah sasaran 1 (satu) “Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi”, sasaran 2 (dua) “Meningkatnya maturitas dan tingkat keamanan informasi”, dan

sasaran 3 (tiga) “Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral”, Penyerapan anggaran Per sasaran strategis 90,42% atau Rp Rp151.682.196.467,- dari total anggaran Rp167.749.485.970. anggaran yang termasuk sasaran strategis sebesar 56,59% dari pagu total anggaran.

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran		Realisasi		% Capaian	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	2	3		4		5	
1	Meningkatnya sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	90.779.981.912	128.021.672.556	86.951.161.865	119.539.287.980	95,78	93,37
2	Meningkatnya maturitas dan tingkat keamanan informasi	968.110.060	1.390.278.100	897.940.940	1.299.494.208	92,75	88.44
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	3.194.327.443	4.762.127.500	3.050.208.974	4.584.374.250	95,49	96.27

Penyerapan anggaran Tahun 2025 dari sasaran strategis Meningkatkan sistem layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi mencapai 95,78 % dari total anggaran Rp90.779.981.912,- capaian anggaran mengalami peningkatan 2,41% dari Tahun 2024 yaitu 93,37% dari total anggaran Rp128.021.672.556,-. Pada sasaran strategis Meningkatkan maturitas dan tingkat keamanan informasi penyerapan anggaran juga mengalami peningkatan dari Tahun 2024 sebesar 4,31% dari Tahun 2024 yaitu 92,75% dari total anggaran Rp1.390.278.100 sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral mengalami penurunan penyerapan sebesar 0,78% dari total anggaran Rp4.762.127.500

Tabel 46. Realisasi anggaran sasaran 4 (empat) Renstra 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Diskominfo Prov. Kaltim	Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim	75	-----	-----	72.807.066.555	60.782.884.688	83,48
		Survei Kepuasan Masyarakat	88	81,73	92,88			

Penyerapan anggaran Sasaran 4 (empat) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Survey Kepuasan Masyarakat mencapai 83,48 % dari total anggaran Rp72.807.066.555 yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

3.4.2. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Tabel 47. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	167.749.485.970,00	151.682.196.467,00	90,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.807.066.555,00	60.782.884.688,00	83,48
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	341.779.300,00	324.600.820,00	94,97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.820.650,00	118.462.171,00	94,15
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44.838.000,00	43.607.401,00	97,26
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.120.650,00	8.520.000,00	93,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.600.000,00	76.624.542,00	90,57
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.400.000,00	77.386.706,00	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.305.451.835,00	17.590.202.704,00	64,42
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.506.300.509,00	16.911.250.183,00	63,8

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.146.964,00	1.920.000,00	89,43
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	729.070.000,00	610.041.700,00	83,67
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.834.756,00	8.529.471,00	96,54
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	27.199.606,00	26.837.750,00	98,67
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	31.900.000,00	31.623.600,00	99,13
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.933.680,00	16.633.100,00	98,22
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.644.560,00	5.643.000,00	99,97
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.644.560,00	5.523.000,00	97,85
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.644.560,00	5.467.100,00	96,86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.970.760,00	50.510.000,00	91,89
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.820.760,00	3.620.000,00	62,19
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.200.000,00	4.800.000,00	92,31
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.300.000,00	32.400.000,00	97,3
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.650.000,00	9.690.000,00	90,99
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.491.756.472,00	1.379.314.743,00	92,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.437.820,00	40.265.000,00	99,57
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.653.486,00	150.127.900,00	96,45
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	132.766.366,00	132.605.745,00	99,88
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.133.378.800,00	1.035.636.098,00	91,38
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.520.000,00	20.680.000,00	70,05
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.555.043.484,00	34.794.648.327,00	95,18
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.877.000,00	39.260.000,00	98,45
Pengadaan Mebel	507.973.017,00	500.920.800,00	98,61
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.007.025.567,00	34.254.467.527,00	95,13
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.900,00	0,00	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.589.425.953,00	5.266.057.726,00	94,21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.736.000,00	16.199.100,00	96,79

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	543.949.100,00	514.170.764,00	94,53
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.962.000,00	259.739.578,00	99,53
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.767.778.853,00	4.475.948.284,00	93,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.451.705.071,00	1.360.917.268,00	93,75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	673.015.999,00	602.789.618,00	89,57
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1.430.000,00	1.400.000,00	97,9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	245.779.072,00	244.327.650,00	99,41
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	531.480.000,00	512.400.000,00	96,41
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	45.379.199.562,00	44.629.129.554,00	98,35
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	45.379.199.562,00	44.629.129.554,00	98,35
Relasi Media	546.374.075,00	387.788.830,00	70,97
Penyusunan Konten	8.181.256.730,00	8.083.974.818,00	98,81
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	95.559.020,00	72.234.200,00	75,59
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	338.641.920,00	235.082.470,00	69,42
Diseminasi Informasi	977.049.894,00	955.070.160,00	97,75
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	118.375.522,00	109.958.040,00	92,89
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.709.771.601,00	1.648.029.219,00	96,39
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	329.068.730,00	292.919.795,00	89,01
Pelayanan Informasi Publik	2.871.468.650,00	2.793.247.358,00	97,28
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	306.054.700,00	305.505.262,00	99,82
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	29.905.578.720,00	29.745.319.402,00	99,46
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	45.400.782.350,00	41.901.954.397,00	92,29
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	60.688.280,00	56.607.400,00	93,28
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	60.688.280,00	56.607.400,00	93,28
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	45.340.094.070,00	41.845.346.997,00	92,29
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	526.722.400,00	475.717.852,00	90,32
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	194.885.000,00	161.092.410,00	82,66

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Koordinasi penyusunan dan/atau revidi arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	160.748.500,00	153.567.000,00	95,53
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	307.128.500,00	221.308.597,00	72,06
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1.245.576.221,00	1.156.060.530,00	92,81
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	93.998.000,00	57.628.511,00	61,31
Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	12.808.412.438,00	11.352.244.246,00	88,63
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	3.000.000,00	1.800.000,00	60
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	1.433.216.667,00	1.418.592.000,00	98,98
Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	178.080.000,00	159.345.609,00	89,48
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	139.068.500,00	122.363.462,00	87,99
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	122.357.000,00	88.773.519,00	72,55
Koordinasi penyusunan proses bisnis	80.822.000,00	22.722.000,00	28,11
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	3.796.661.466,00	3.295.949.053,00	86,81
Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	2.860.000,00	2.856.000,00	99,86
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	371.455.600,00	304.254.539,00	81,91
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	12.242.251.584,00	11.917.879.464,00	97,35
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	11.632.850.194,00	10.933.192.205,00	93,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	3.194.327.443,00	3.050.208.974,00	95,49
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	3.194.327.443,00	3.050.208.974,00	95,49
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	843.367.361,00	798.521.681,00	94,68
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	358.340.702,00	312.404.602,00	74,29
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	958.754.392,00	918.946.851,00	95,85
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	521.466.372,00	515.879.472,00	98,93
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	512.398.616,00	504.456.368,00	98,45
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	968.110.060,00	897.940.940,00	92,75
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	839.367.911,00	772.503.586,00	92,03
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	40.169.788,00	22.670.888,00	56,44

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	85.534.000,00	83.970.237,00	98,17
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	671.188.123,00	623.977.896,00	92,97
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	42.476.000,00	41.884.565,00	55,87
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	128.742.149,00	125.437.354,00	97,43
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	128.742.149,00	125.437.354,00	97,43

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pembangunan Komunikasi dan Informatika tahun 2025 tidak terlepas dari anggaran yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur padatahun 2024 mempunyai alokasi anggaran baik bersumber dari APBD (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Pencapaian sasaran strategis didukung oleh capaian realisasi pada program, kegiatan hingga sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Program/kegiatan/subkegiatan ini secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun permasalahan yang ada pada pencapaian realisasi keuangan sebagai berikut:

1. Penetapan APBD-P yang terlambat menyebabkan penundaan pelaksanaan kegiatan.
2. Terdapat sisa nilai kontrak belanja barang jasa (efisiensi belanja).
3. Perubahan aturan atau regulasi teknis yang cepat membuat implementasi di lapangan terhambat.

BAB IV **P E N U T U P**

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2000-2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Gubernur maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antar bidang kegiatan serta ketekunan dalam pengumpulan data informasi sangat diperlukan, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2. Saran

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2025, diperlukan saran-saran yang membangun antara lain :

- 1) Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diperlukan sinergitas antara Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
- 2) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari stakeholder dalam melaksanakan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja. Selain itu, segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan menghasilkan output maupun outcomes kegiatan yang terukur, bermanfaat dan akuntabel.